

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kepada Pemerintah Daerah di dorong untuk berperan aktif di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan berusaha memberdayakan ekonomi rakyat untuk memperkuat struktur ekonomi di daerah.

Selanjutnya dalam ketetapan MPR Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi menyatakan bahwa Politik Ekonomi Nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha kecil dan menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha swasta dan Badan Usaha Milik Negara yang saling memperkuat untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi dan Effisiensi Nasional yang berdaya saing tinggi.

Untuk mengaplikasikan Politik Ekonomi Nasional di dalam mewujudkan kesejahteraan Bangsa diperlukan prakarsa yang dapat membangun suatu system yang bisa mewartakan Usaha Ekonomi Rakyat yang mengacu kepada konsep dan strategi yang berkelanjutan. Kepentingan rakyat menjadi inti sari dari perencanaan tersebut, sehingga kepentingan itu harus digali dan dijabarkan berdasarkan prakarsa dan aspirasi rakyat sebagai pelaku pembangunan secara langsung salah satu aspek yang paling berpengaruh untuk mewujudkan kemandirian adalah aspek ekonomi. Dalam pengembangan bidang ekonomi sebagai sasaran utama yang perlu

diprioritaskan adalah bagaimana perusahaan kelompok ataupun pribadi dapat tumbuh dan mandiri dalam operasionalnya. Hambatan yang biasa ditemui adalah belum termanfaatkannya sumber daya yang ada secara optimal. Serta ditambah dengan kondisi rendahnya kemampuan modal untuk pengembangan usaha, mana dalam pengelolaan usaha produktif.

Menurut Tan (2004) dengan hadirnya Otonomi Daerah, Kepala daerah mulai tertantang dan terpacu untuk berlomba-lomba memacu kemajuan pembangunan daerahnya, disamping berlomba-lomba mengambil hati rakyat banyak dengan menyiapkan program-program yang terkait dan menyentuh kehidupan mereka. Dengan kebijakan Otonomi Daerah diharapkan akan tumbuh perekonomian yang lebih inovatif, terbuka dan mandiri, kemudian memberikan kesempatan kepada swasta agar lebih berperan dalam pembangunan ekonomi daerah, memberikan keleluasaan daerah untuk bisa melakukan dan membangun kerja sama ekonomi yang lebih baik dengan sesamanya dan dengan swasta maupun dengan pihak-pihak lain.

Menurut Lains (1999) dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan tenaga pendamping untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada masyarakat dalam memilih usaha yang akan dilaksanakan, bimbingan juga perlu diberikan kepada mereka yang ingin mencoba usaha baru yang menyimpang dari pengalaman usaha yang dipunyai. Pendamping yang diperlukan itu haruslah aktif dan menetap di desa serta mampu memberikan penyuluhan, bukan hanya menyangkut bidang usaha yang digeluti saja tapi juga menyangkut bidang usaha lainnya yang masih bersifat baru bagi masyarakat. Selanjutnya usaha pemberdayaan masyarakat harus pula disokong oleh aparat pemerintah.

Menurut Sulehale (1996) pemerintah harus mengambil prakarsa untuk mendekati LSM dan menawarkan kerjasama program, sebab LSM mampu menjangkau lapisan terbawah masyarakat. Sasono (1995) mengatakan ada lima langkah strategis yang dapat dilakukan LSM:

Pertama; membantu proses pelebagaan ekonomi rakyat agar mempunyai posisi tawar yang lebih seimbang dalam interaksinya dengan kekuatan bisnis besar atau pemerintah.

Kedua; Mendukung peningkatan manajemen dan produktivitas ekonomi rakyat.

Ketiga; Mengembangkan advokasi kebijakan agar terjadi proses pengambilan keputusan yang lebih tanggap terhadap kepentingan masyarakat.

Keempat; mengembangkan semangat kemitraan sosial antar pelaku pembangunan menuju pemerataan.

Kelima; Menjembatani sumber daya resmi dengan aspirasi, kebutuhan, dan kondisi ekonomi rakyat melalui pelayanan teknis.

Dengan meningkatnya kerja sama dan hubungan kemitraan antara pemerintah dengan LSM, maka berbagai tingkat rawan dalam pelaksanaan pembangunan dapat ditemukan dan ditanggulangi lebih dini. LSM Indonesia akan merasa diberdayakan dan hal ini akan memberi mereka gairah kerja yang lebih besar dalam membantu merumuskan dan melaksanakan program program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat menurut Prawirokusumo(2001) tidak terlepas dari program pemberdayaan untuk usaha kecil dan menengah, walaupun secara umum UKM memiliki kedudukan yang sangat potensial dalam perekonomian nasional, kenyataanya masih banyak masalah yang

menghadang dalam pengembangan UKM. Dalam hal ini diantaranya adalah kelemahan akses dan perluasan pasar, kelemahan akses dan pemupukan modal, kelemahan akses dalam informasi dan teknologi, kelemahan manajemen, serta kelemahan dalam jaringan usaha, yang semuanya bersumber dari kelemahan sumber daya manusia. Berdasarkan informasi dari BDC sampai dengan tahun 2005, tercatat sebanyak 1180 pengusaha kecil dan menengah di kota Sawahlunto, dari jumlah tersebut 95,34% (1125 UKM) adalah UKM yang masih membutuhkan perhatian dalam hal permodalan, pemasaran, dan manajemen usaha, dan hanya 4,66% (55 UKM) yang dapat dikatakan cukup mandiri artinya , modal diatas 20 juta, pasar sudah jelas, manajemen usaha cukup baik.

Pemerintah kota Sawahlunto adalah yang pertama kali melaksanakan sistim kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, Lembaga Pemerhati Wanita Anak dan Lingkungan (LPWAL) adalah LSM yang terpilih bermitra dengan BDC dan bertugas sebagai fasilitator dari dana kemitraan yang telah disediakan oleh pemerintah kota Sawahlunto.

Artinya BDC sebagai badan Independen memberikan pelayanan dan pendampingan pengembangan usaha kecil dalam upaya memacu pemberdayaan ekonomi masyarakat di kota Sawahlunto, hal ini tercermin dari tujuan diadakannya BDC yaitu:

Tujuan berdirinya BDC ini sudah sejalan dengan yang disampaikan oleh Prawirokusumo(2001), yaitu apabila usaha kecil ingin diberdayakan, maka hal yang perlu diperhatikan adalah ;

- a. Kelancaran pelayan kredit dari bank
- b. Manajemen usaha yang lebih berkualitas
- c. Pemasaran hasil produksi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas Pemerintah Sawahlunto telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi di daerah dengan melakukan pengembangan ekonomi kerakyatan/ sektor riil. Seperti yang dikemukakan dalam isi Rencana Strategi (Renstra) pemerintah kota Sawahlunto/ tahun 2003 – 2008 yaitu “Mendorong berkembangnya usaha ekonomi rakyat/ sektor riil dengan melaksanakan pola Kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta”.

Pada tanggal 2 Mei 2002 ditanda tangani naskah perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Sawahlunto dengan LPWAL (Lembaga Pemerhati Wanita dan Anak) Sebagai cikal bakal lahirnya BDC (Business Development Center) yaitu suatu badan independent yang menyediakan pelayanan dan pendampingan sebagai pusat pengembangan usaha bagi pengusaha kecil dan menengah. Disamping itu BDC juga menjalankan peran peran yang bersifat memacu pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti; pendampingan dalam pengembangan usaha, pembuatan rencana usaha/proposal kredit, pelatihan manajemen usaha/pembukuan, konsultasi bisnis, pelatihan teknis, akses ke sumberdaya (modal dan pasar), jasa promosi, dan laporan kelayakan usaha.

Keberadaan BDC di Kota Sawahlunto telah mendapat respon yang positif dari masyarakat, hal ini terlihat dari jumlah UKM yang telah memperoleh kredit Dana Kemitraan yang difasilitasi oleh BDC saat ini (dari tahun anggaran 2002

sampai dengan 2005) berjumlah 540 UKM (43,87 persen dari jumlah UKM yang terdaftar), dengan total nilai kredit sebesar Rp. 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah). Mengingat pentingnya peranan BDC bagi pengembangan UKM, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat maka penelitian mengenai “ANALISIS PERAN *BUSINESS DEVELOPMENT CENTER (BDC)* SEBAGAI FASILITATOR PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI SEKTOR PERTANIAN DI KOTA SAWAHLUNTO” sangat relevan untuk dilakukan.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah BDC telah menjalankan perannya sebagai fasilitator pemberdayaan ekonomi masyarakat disektor pertanian ditinjau dari :
 - a. Meningkatkan kelancaran pelayanan kredit dari bank,
 - b. Meningkatkan pengetahuan tentang manajemen usaha yang lebih berkualitas,
 - c. Perluasan pemasaran hasil produksi
2. Bagaimana persepsi UKM terhadap peran BDC dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di sektor pertanian.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis peranan BDC sebagai fasilitator pemberdayaan ekonomi masyarakat, ditinjau dari, meningkatkan kelancaran pelayanan kredit dari bank,



meningkatkan pengetahuan tentang manajemen usaha yang lebih berkualitas, dan perluasan pemasaran hasil produksi.

- b. Menganalisis persepsi UKM terhadap peran BDC dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di sektor pertanian.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Tambah referensi dan kontribusi bagi pengambil kebijakan (pemerintah) dalam melakukan proses pembangunan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat pedesaan khususnya masyarakat lapisan bawah.
- b. Bacaan strategis dan rujukan bagi peneliti berikut yang tertarik untuk mendalami program dana kemitraan dalam persoalan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- c. Sebagai perbandingan dan bahan acuan bagi Pemda lainnya

